

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori *Stakeholders*

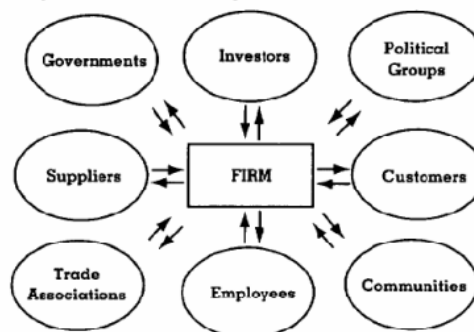
Teori *stakeholders* merupakan salah satu teori utama yang banyak digunakan untuk mendasari penelitian tentang *sustainability report*. Salah satu pendukung teori ini adalah Donaldson dan Preston (1995) yang berpendapat bahwa teori *stakeholder* memperluas tanggung jawab organisasi kepada seluruh pemangku kepentingan tidak hanya kepada investor atau pemilik perusahaan. Pemikiran awal tentang teori *stakeholder* dicetuskan oleh Freeman pada tahun 1984. Freeman (1984), mendefinisikan *stakeholders* sebagai kelompok yang secara signifikan mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan sebuah organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara singkat, Freeman menggambarkan teori *stakeholder* sebagai respon manajer kepada lingkungan bisnis yang ada (Laplume, Sonpar and Litz, 2008).

Terdapat dua jenis model teori *stakeholder* yang dikatakan oleh freeman yakni (1) model kebijakan dan perencanaan bisnis, dan (2) model tanggung jawab sosial perusahaan dari manajemen *stakeholder*. Fokus pada model pertama adalah tentang cara-cara bagaimana perusahaan mengembangkan dan mengevaluasi persetujuan keputusan strategis terhadap kelompok *stakeholder* yang dukungannya

sangat diperlukan perusahaan dalam kelangsungan usahanya. Sementara fokus pada model kedua adalah perencanaan dan analisis perusahaan yang lebih kompleks dengan memasukan pengaruh kelompok eksternal yang mungkin saja berlawanan dengan perusahaan. Kelompok ini meliputi badan regulator (pemerintah), lingkungan dan/atau kelompok yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan sosial.

Berdasarkan karakteristiknya *stakeholder* dapat dibagi menjadi dua yaitu *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder (Clarkson, 1995). *Stakeholder* primer adalah seseorang atau kelompok yang tanpanya perusahaan tidak dapat bertahan untuk *going concern*, meliputi : *shareholder* dan investor, karyawan, konsumen dan pemasok, bersama dengan yang didefinisikan sebagai kelompok *stakeholder* publik, yaitu : pemerintah dan komunitas. Kelompok *stakeholder* sekunder didefinisikan sebagai mereka yang mempengaruhi, atau dipengaruhi perusahaan, namun tidak berhubungan dengan transaksi dengan perusahaan dan tidak esensial kelangsungannya. Dari dua jenis *stakeholder* diatas, *stakeholder* primer adalah *stakeholder* yang paling berpengaruh bagi kelangsungan perusahaan karena mempunyai power yang cukup tinggi terhadap ketersediaan sumber daya perusahaan (Jenia Nur Soelistyoningrum 2011).

Contrasting Models of the Corporation: The Stakeholder Model



Gambar 2.2 Model *Stakholder* Perusahaan

Sumber: Donaldson dan Preston (1995)

Perusahaan harus menjaga hubungan dengan para pemangku kepentingan dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan yang ada, terutama para pemangku kepentingan yang mempunyai kekuatan terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, seperti tenaga kerja, pelanggan dan pemilik (Ghozali dan Chariri, 2007).

Dalam pengambilan keputusan, para *stakeholder* membutuhkan informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan aktivitas yang telah dilakukan. Perusahaan akan berusaha untuk mengungkapkan informasi yang berintegritas, agar para *stakeholder* tetap menaruh kepercayaan terhadap perusahaan. Melalui pengungkapan *sustainability report* perusahaan dapat memberikan informasi yang lebih cukup dan lengkap berkaitan dengan kegiatan dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial, masyarakat dan lingkungan (Ghozali dan Chariri, 2007 (dalam Sari, 2013)).

Oleh karena itu kelangsungan hidup organisasi bergantung pada dukungan para pemangku kepentingan sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Salah satu strategi untuk menjaga hubungan dengan para pemangku kepentingan perusahaan adalah dengan mengungkapkan *sustainability report* yang meliputi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Pengungkapan *sustainability report* diharapkan dapat memenuhi keinginan dari para pemangku kepentingan sehingga akan menghasilkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan, sehingga organisasi dapat

mencapai keberlanjutan dimasa akan datang (Josua Tarigan dan Hatane Samuel 2014).

Donaldson dan Preston (1995) menjelaskan bahwa teori *stakeholder* dibagi menjadi tiga aspek, yaitu :

1. *Descriptive/Empirical*, yang menyatakan bahwa teori digunakan untuk menjelaskan karakter khusus dan perilaku perusahaan.
2. *Instrumental*, sebagai tambahan dari data *descriptive*, maka teori digunakan untuk mengidentifikasikan hubungan antara manajemen *stakeholders* dengan hasil yang didapatkan (profitabilitas, pertumbuhan, dll).
3. *Normative*, yang menyatakan bahwa teori digunakan untuk menginterpretasikan fungsi dari perusahaan, termasuk mengidentifikasi pedoman moral dan filosofi pada operasi dan manajemen perusahaan.

2.1.2 Teori Legitimasi

Teori kedua yang mempengaruhi pemikiran laporan berkelanjutan adalah teori legitimasi. Kedua teori baik *legitimacy theory* dan *stakeholders theory* merupakan teori yang menjelaskan motivasi para manajer atau organisasi untuk melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan. Jika teori *stakeholder* dimotivasi oleh pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan, maka teori legitimasi menggunakan motivasi untuk mendapatkan pengesahan atau penerimaan dari masyarakat (Laan, 2009). Teori legitimasi menegaskan bahwa perusahaan terus berupaya untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam

bingkai dan norma yang ada dalam masyarakat atau lingkungan dimana perusahaan berada, dimana mereka berusaha untuk memastikan bahwa aktifitas mereka diterima oleh pihak luar sebagai suatu yang sah (Deegan, 2004).

Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa hal yang melandasi teori legitimasi adalah kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi. Shocker dan Sethi dalam Ghozali dan Chariri (2007) memberikan penjelasan tentang konsep kontrak sosial, bahwa semua organisasi memiliki kontrak sosial, baik eksplisit maupun implisit, dimana kelangsungan hidup dan pertumbuhan organisasi tergantung pada apa yang dapat dikontribusikan oleh organisasi kepada masyarakat luas. Apabila organisasi memberikan kontribusi sosial, maka keberadaan perusahaan dan aktivitas yang dilakukan mendapat “status” atau “restu” dari masyarakat atau lingkungan dimana perusahaan tersebut beroperasi.

Teori legitimasi mendorong perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Laporan aktivitas tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dituangkan dalam *sustainability report* dapat digunakan oleh perusahaan untuk membuktikan bahwa perusahaan telah menjalankan tanggung jawab sosial. Hal ini sebagai upaya agar keberadaan organisasi dapat diterima oleh masyarakat. Legitimasi dari masyarakat merupakan salah satu sumber daya operasional yang penting bagi perusahaan (Josua Tarigan dan Hatane Samuel 2014:16).

Inti dari teori legitimasi adalah bagaimana perusahaan mampu berinteraksi dengan masyarakat disekitarnya untuk mendapatkan restu. Dowling dan Prefer

(dalam Ghozali dan Chariri, 2007) memberikan alasan yang logis tentang legitimasi organisasi sebagai berikut :

“Organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem tersebut. Selama kedua sistem nilai tersebut selaras, kita dapat melihat hal tersebut sebagai legitimasi perusahaan. Ketika ketidaksielarasan aktual dan potensial terjadi diantara kedua sistem tersebut, maka ada ancaman terhadap legitimasi perusahaan”.

2.1.3 Laba

2.1.3.1 Definisi Laba

Perusahaan dituntut untuk menghasilkan laba supaya mampu bertahan dan berkembang. Laba juga menjadi salah satu faktor penting dalam segala pengukuran oleh *stakeholder* dalam pengambilan keputusannya.

Menurut Kasmir (2015: 45), laba adalah: “... selisih dari jumlah pendapatan dan biaya, dengan hasil jumlah pendapatan perusahaan lebih besar dari jumlah biaya”.

Menurut Suwardjono (2008:464), definisi laba adalah: “... dimaknai sebagai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan diatas biaya (biaya total yang melekat dalam kegiatan produksi dan penyerahan barang/jasa)”.

Menurut Hery (2016: 15), laba adalah: “... kenaikan dalam ekuitas (aset bersih) entitas yang ditimbulkan oleh transaksi *pheriperal* (transaksi diluar operasi utama atau operasi sentral perusahaan) atau transaksi insidental (transaksi yang

keterjadiannya jarang) dan dari seluruh transaksi lainnya serta peristiwa menurut keadaan-keadaan lainnya yang mempengaruhi entitas, tidak termasuk yang berasal dari pendapatan atau investasi oleh pemilik.”

Sedangkan menurut Dwi Martani, dkk (2012:113), pengertian laba adalah : “... pendapatan yang diperoleh apabila jumlah *financial* (uang) dari aset neto pada akhir periode (diluar dari distribusi dan kontribusi pemilik perusahaan) melebihi aset neto pada awal periode”.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Laba

Menurut Kasmir (2011:303), jenis-jenis laba adalah sebagai berikut :

1. “Laba kotor (*gross profit*) artinya laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh.
2. Laba bersih (*net profit*) merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak.”

2.1.3.3 Fungsi Laba

Chariri dan Ghozali (2001) dalam Fiatmoko (2015:27) mengatakan bahwa informasi tentang laba perusahaan dapat digunakan sebagai :

- a. “Sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian.
- b. Sebagai pengukur prestasi manajemen.
- c. Sebagai dasar penentuan besarnya penggunaan pajak.
- d. Sebagai alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara.
- e. Sebagai dasar kompensasi dan pembagian bonus.
- f. Sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan.
- g. Sebagai dasar untuk kenaikan kemakmuran.

h. Sebagai dasar pembagian deviden.”

2.1.4 Profitabilitas

2.1.4.1 Pengertian Profitabilitas

Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2013:699) menjelaskan bahwa rasio profitabilitas adalah :

“Profitability ratios measure the income or operating success of company for a given period of time. Income, or the lack of it, affects the company’s ability for obtain debt and equity financing. It also affects the company’s liquidity position and the company’s ability to grow. As a consequences, both creditors and investors are onterestes in evaluating power-profitability. Analysts frequently use profitability as the ultimate test of management’s operating and comparative data”.

Kemudian Cornett, Adair, dan Nofsinger (2012:55) mengemukakan rasio profitabilitas sebagai berikut :

“Profitability retios show the combined effects of liquidity, asset management, and debt management on the overall operating results of the firm. Profitability ratios are among the most watched and best known of the financial ratios. Indeed, firm values (or stock prices) react quickly to unexpected changes in these ratios”.

Rasio Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau pendapatan investasi. Semakin tinggi nilai rasio profitabilitas menunjukkan bahwa suatu perusahaan semakin efisien dalam memanfaatkan aktivitya untuk memperoleh laba (Kasmir, 2012:114).

Menurut Husnan dan Pudjiastuti (2015:76) pengertian rasio profitabilitas adalah: "... rasio ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penjualannya, dari aset-aset yang dimilikinya, atau dari ekuitas yang dimilikinya".

Definisi menurut Munawir (2014:33) yang dimaksud profitabilitas adalah: "...menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktiva secara produktif, dengan demikian rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut".

Menurut Kasmir (2017:197), tujuan dan manfaat menggunakan profitabilitas adalah sebagai berikut :

Tujuan penggunaan profitabilitas bagi perusahaan dan luar perusahaan adalah :

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu;
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri;

Adapun manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas adalah untuk:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode;
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;

2.1.4.2 Pengukuran Profitabilitas

Menurut Hanafi dan Halim (2012:81-82), rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Rasio profitabilitas antara lain :

1. *Net Profit Margin* adalah rasio yang digunakan untuk menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. *Net Profit Margin* dinyatakan dalam rumus sebagai berikut :

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

2. *Return On Asset* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. *Return On Asset* dinyatakan dalam rumus sebagai berikut :

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

3. *Return On Equity* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan modal saham tertentu. *Return On Equity* dinyatakan dalam rumus sebagai berikut :

4.
$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$
 an kemampuan perusahaan melahirkan laba yang akan menutupi biaya-biaya tetap atau biaya operasi lainnya. *Gross Profit Margin* dinyatakan dalam rumus sebagai berikut :

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Kemudian Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2013:699) dalam praktik pengukuran rasio profitabilitas, ada beberapa jenis rasio dalam profitabilitas yang dapat digunakan sebagai berikut :

1. *Profit Margin*

Profit margin is a measure of the percentage of each euro of sales that results in net income. The profit margin is calculated as follows:

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Net Sales}} \times 100\%$$

2. *Assets Turnover*

Asset Turnover measures how efficiently a company uses its assets to generate sales. The asset turnover is calculated as follows:

$$\text{Assets Turnover} = \frac{\text{Net sales}}{\text{Average Sales}} \times 100\%$$

3. *Return On Assets (ROA)*

Return on assets is measure the overall effectiveness of management in generating profits with its available assets. The higher the firm's return on assets, the better.. The return on assets is calculated as follows:

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Average Assets}} \times 100\%$$

4. *Return on Ordinary Shareholders Equity*

Return on Ordinary Shareholders Equity it measures profitability from the ordinary shareholders' viewpoint. This ratio shows how many euros of net income the company earned for each euro invested by owners. Return on ordinary shareholders equity is calculated as follows :

$$ROSHE = \frac{\text{Net Income} - \text{Preference Deividends}}{\text{Average Ordinary Shareholders 'Equity}} \times 100$$

2.1.5 Ukuran Perusahaan

2.1.5.1 Pengertian Perusahaan

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, perusahaan adalah:

- a. “Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Menurut Nanu Hasanuh (2011:2), perusahaan adalah: “... wadah atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama pendirinya dengan melakukan kegiatan ekonomis yaitu memproduksi barang dan jasa dalam suatu masyarakat”.

Menurut Alexandria (2009:2), perusahaan adalah: “... unit kegiatan ekonomi yang dikelola dan dijalankan dengan cara mengubah sumber daya ekonomi menjadi produk dan jasa untuk kebutuhan masyarakat untuk memperoleh laba atau keuntungan”. Sedangkan Menurut Hery (2016:2), perusahaan adalah: “...

sebuah organisasi yang beroperasi dengan tujuan menghasilkan keuntungan dengan cara menjual produk (barang atau jasa) kepada para pelanggannya”.

Dari beberapa pengertian mengenai perusahaan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan adalah suatu organisasi yang memiliki sumber daya untuk membuat suatu produk atau jasa yang dijual kepada masyarakat, perusahaan, ataupun institusi dengan orientasi memperoleh laba atau keuntungan.

2.1.5.2 Jenis-Jenis Perusahaan

Menurut Rudianto (2013:15), dilihat dari bidang usaha yang digeluti dan produk yang dihasilkan, perusahaan dibedakan menjadi 3 yaitu :

1. “Perusahaan jasa yaitu perusahaan yang produknya adalah yang bersifat nonfisik, seperti perusahaan transportasi, biro wisata, bioskop, konsultan, akuntan, dan sebagainya.
2. Perusahaan dagang yaitu perusahaan yang membeli barang dari perusahaan lain dan menjual kepada pihak yang membutuhkan/konsumen, sebagai contoh: pasar swalayan, distributor elektronik, dan sebagainya.
3. Perusahaan manufaktur yaitu perusahaan yang membeli bahan baku mengolahnya hingga menjadi produk jadi yang siap pakai. Sebagai contoh: produsen mie instan mengolah tepung terigu hingga menjadi mie instan serta produsen pakaian mengolah kain menjadi kemeja.”

2.1.5.3 Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain (Prasetyorini 2013:186).

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan, dan rata-rata total aset (Kusuma, 2014).

Menurut Ernawati (2015) ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aset atau total penjualan bersih. Semakin besar total aset maupun penjualannya, maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan. Semakin besar aset, maka semakin besar modal yang ditanam. Sementara semakin banyak penjualan, maka semakin banyak juga perputaran uang dalam perusahaan.

Menurut Simbolon dan Sueb (2016) Ukuran perusahaan adalah faktor penentu penting dalam pengungkapan perusahaan. Perusahaan besar memiliki jumlah aset, penjualan dan sistem informasi yang baik sehingga pengungkapan memungkinkan menjadi lebih luas. Selain itu perusahaan yang besar akan lebih terlihat dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap sosial lingkungan.

Perusahaan dengan ukuran besar memiliki akses lebih besar dan luas untuk mendapat sumber pendanaan dari luar, sehingga untuk memperoleh pinjaman akan menjadi lebih mudah karena dikatakan bahwa perusahaan dengan ukuran besar memiliki kesempatan lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri (Puspitasari dan Jogi, 2013).

2.1.5.4 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha

menengah, dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total asset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan.

Dalam UU No. 20 Tahun 2008 pasal 1 mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang berbunyi :

1. “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.”

Adapun kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No. 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha kecil/ukuran perusahaan kecil sampai ukuran perusahaan besar dapat dilihat dari segi keuangan dalam modal yang dimilikinya adalah :

1. “Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
4. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.”

Pada sampai penelitian ini dibuat, belum ada undang-undang terbaru yang mengatur ukuran perusahaan, adapun PP No. 8 Tahun 2021 yakni hanyalah mengatur modal dasar pembuatan perseroan, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil bukan mengatur dan membahas mengenai pengklasifikasian ukuran perusahaan, sehingga penelitian ini masih menggunakan undang-undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6.

2.1.5.5 Pengertian Aset

Pengertian aktiva menurut Al Haryono Jusup (2012:28), adalah: "...sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang biasa dinyatakan dalam satuan uang".

Menurut Kasmir (2012:39), aktiva adalah: "... harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik pada saat tertentu maupun periode tertentu".

Menurut Rudianto (2012:28), pengertian aktiva yaitu: "... sumber daya yang dimiliki perusahaan. Asset merupakan kumpulan dari berbagai kekayaan yang dimiliki perusahaan yang akan digunakan untuk memperoleh penghasilan selama tahun berjalan maupun tahun-tahun berikutnya".

Aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan akibat dari peristiwa yang terjadi di masa lalu dan diharapkan akan memberikan manfaat ekonomis dimasa yang akan datang (Effendi, 2013:12).

Sedangkan menurut Mamduh M.Hanafi (2003:24), adalah : "... aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darinya manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan akan diraih oleh perusahaan."

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa aset/aktiva adalah harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang terjadi di masa lalu, yang kemudian digunakan untuk memperoleh penghasilan selama periode tertentu, dan diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang.

2.1.5.6 Jenis-Jenis Aset

Menurut Kasmir (2016: 31), jenis-jenis aktiva adalah sebagai berikut :

1. “Aktiva Lancar

Aktiva lancar merupakan “... harta atau kekayaan yang segera dapat diuangkan (ditunaikan) pada saat dibutuhkan dan paling lama satu tahun. Aktiva lancar merupakan aktiva yang paling liquid dari aktiva lainnya. Jika perusahaan membutuhkan uang untuk membayar sesuatu yang segera harus dibayar misalnya utang yang sudah jatuh tempo, atau pembelian suatu barang atau jasa, uang tersebut dapat diperoleh dari aktiva lancar. Komponen yang ada di aktiva lancar terdiri dari antara lain kas, bank, surat-surat berharga, piutang, sediaan, sewa dibayar di muka dan aktiva lancar lainnya. Penyusunan aktiva lancar ini biasanya dimulai dari aktiva yang paling lancar, artinya yang paling mudah untuk dicairkan”.

2. Aktiva Tetap

Aktiva tetap merupakan “... harta atau kekayaan perusahaan yang digunakan dalam jangka panjang lebih dari satu tahun. Secara garis besar aktiva tetap dibagi dua macam, yaitu: aktiva tetap yang berwujud (tampak fisik), seperti: tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan lainnya, dan aktiva tetap yang tidak berwujud (tidak tampak fisik) merupakan hak yang dimiliki perusahaan, contoh: hak paten, merek dagang, goodwill, lisensi dan lainnya”.

3. Aktiva lainnya.

Aktiva lainnya merupakan “... harta atau kekayaan yang tidak dapat digolongkan ke dalam aktiva lancar maupun aktiva tetap. Komponen yang ada dalam aktiva lainnya adalah seperti: bangunan dalam proses, piutang jangka panjang, tanah dalam penyelesaian dan lainnya.”

Sedangkan menurut Danang Sunyoto (2013:124) aktiva dikelompokkan menjadi beberapa jenis antara lain :

1. “Aktiva Lancar (*Current Assets*)
2. Investasi Jangka Panjang
3. Aktiva Tetap Berwujud (*Fixed Assets*)

4. Aktiva Tetap Tidak Berwujud (*Intangible Assets*)
5. Aktiva Lain-Lain”

Masing-masing jenis aktiva tetap tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aktiva Lancar (*Current Assets*), yaitu kas dan sumber-sumber ekonomis lainnya yang dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau habis dipakai dalam rentang waktu satu tahun sejak tanggal neraca atau selama satu siklus kegiatan normal perusahaan. Termasuk dalam aktiva lancar antara lain adalah kas dan piutang usaha.
2. Investasi Jangka Panjang, merupakan bentuk penyertaan di perusahaan lain dalam jangka panjang baik untuk memperoleh pendapatan tetap (berupa bunga) dan pendapatan tidak tetap (deviden).
3. Aktiva Tetap Berwujud (*Fixed Assets*), adalah sumber-sumber ekonomis yang berwujud yang cara memperolehnya sudah dalam kondisi siap untuk dipakai atau dengan membangun lebih dulu. Contoh dari aktiva tetap berwujud adalah kendaraan dan tanah.
4. Aktiva Tetap Tidak Berwujud (*Intangible Assets*), yang termasuk di dalam aktiva tidak berwujud antara lain hak paten.
5. Aktiva Lain-lain, adalah aktiva-aktiva yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Contoh dari aktiva lain-lain misalnya titipan kepada penjual untuk menjamin kontrak, uang muka pada pejabat perusahaan dan lain-lain.”

2.1.5.7 Metode Pengukuran Ukuran Perusahaan

Menurut Harahap (2013:23), yang dimaksud pengukuran ukuran perusahaan adalah :

“... ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural (\ln) dari rata-rata total aktiva (total aset) perusahaan. Penggunaan total aktiva berdasarkan pertimbangan bahwa total aktiva mencerminkan ukuran perusahaan dan diduga mempengaruhi ketepatan waktu”.

Menurut Werner R. Murhadi (2013), *firm size* diukur dengan mentransformasikan total aset yang dimiliki perusahaan ke dalam bentuk logaritma natural. Ukuran perusahaan diproksikan dengan menggunakan *Log Natural Total Aset* dengan tujuan agar mengurangi fluktuasi data yang berlebih. Dengan menggunakan *log natural*, jumlah aset dengan nilai ratusan miliar bahkan triliun akan disederhanakan, tanpa mengubah proporsi dari jumlah aset yang sesungguhnya.

Menurut Prasetyorini (2013), ukuran perusahaan adalah ukuran atau besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan yang diukur dengan logaritma natural dari total aktiva. Sehingga ukuran perusahaan bisa dihitung dengan rumus :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln (Total Aktiva)}$$

Sedangkan Menurut Niresh dalam Rasyid (2014), ukuran perusahaan dapat diukur dengan total penjualan. Sebuah perusahaan diharapkan mempunyai penjualan yang terus meningkat, karena ketika penjualan semakin meningkat perusahaan dapat menutup biaya yang keluar pada saat proses produksi dengan begitu laba perusahaan akan meningkat yang selanjutnya akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Sehingga ukuran perusahaan bisa dihitung dengan rumus:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln (Total Penjualan)}$$

Oleh karena itu, Sudirham (2011) berpendapat bahwa *logaritma natural* adalah logaritma dengan menggunakan basis bilangan 'e'. Bilangan 'e' ini, seperti

halnya bilangan π , adalah bilangan nyata dengan desimal tak terbatas. *Natural log* dalam penelitian ini dirumuskan dalam $\ln(x)$ atau $\ln(\text{Total Aset})$.

2.1.6 *Good Corporate Governance Disclosure*

Kusumawati (2007) menyatakan bahwa studi-studi yang telah dilakukan selama ini, pengungkapan laporan tahunan dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pengungkapan umum dan pengungkapan tertentu, pengungkapan umum berupa pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku dalam hal ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang melebihi dari yang diwajibkan. Pengungkapan tertentu meliputi: *financial disclosure*, *social responsibility disclosure*, *environmental disclosure*, termasuk pengungkapan aspek tata kelola perusahaan (*corporate governance*).

Di Indonesia sendiri kebijakan mengenai pengungkapan tata kelola atau *corporate governance disclosure* diatur oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) atau sekarang dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-431/BL/2012 Peraturan Nomor X.K.6 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, yang sekarang telah diperbarui menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam keputusan Ketua

BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-431/BL/2012 dinyatakan bahwa laporan tahunan paling sedikit memuat informasi mengenai:

1. Ikhtisar data keuangan penting,
2. Laporan Dewan Komisaris,
3. Laporan Direksi,
4. Profil Perusahaan,
5. Analisis dan pembahasan manajemen,
6. Tata kelola perusahaan,
7. Tanggungjawab sosial perusahaan,
8. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan
9. Surat pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi laporan tahunan.

Pernyataan yang sama juga tercantum dalam peraturan terbaru pasar modal yang mengatur laporan tahunan perusahaan publik yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, dimana dinyatakan berlaku untuk penyusunan Laporan Tahunan Perusahaan Publik yang disampaikan kepada OJK mulai tahun 2017. Berdasarkan peraturan diatas, salah satu item yang harus ada dalam laporan tahunan perusahaan publik adalah informasi tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Dengan demikian pengungkapan tata kelola perusahaan dalam laporan tahunan merupakan hal penting yang harus dilakukan demi menjaga kepentingan *stakeholder*.

2.1.6.1 Definisi *Good Corporate Governance*

The Institute for Corporate Governance dalam penelitian Sutedi, 2011 mengartikan *good corporate governance* sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya berdasarkan norma, etika, budaya dan aturan yang berlaku. Sedangkan menurut surat Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) yaitu tata kelola perusahaan yang baik (*Good corporate governance*) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Sedangkan menurut Weimer dan Pape (1999) mekanisme *corporate governance* adalah metode yang digunakan pada tingkat perusahaan untuk memecahkan masalah tata kelola perusahaan.

Istilah *Corporate Governance* seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai tata kelola perusahaan. Secara umum, *good corporate governance* merupakan suatu sistem pengendalian dan tata kelola perusahaan, yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan (*hard definition*) antara pihak-pihak dalam manajemen perusahaan dan “nilai” yang terkandung dalam mekanisme manajemen itu sendiri (*soft definition*) (Kusmayadi et al., 2015).

Shleifer dan Vishny, 1997 dalam Herawaty, (2008) menjelaskan bahwa *corporate governance* merupakan suatu mekanisme pengelolaan perusahaan yang didasarkan pada teori agensi. Dengan adanya penerapan *Corporate Governance*

diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberi keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang mereka investasikan pada suatu perusahaan. *Corporate Governance* berkaitan dengan bagaimana investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi investor, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana yang telah ditanamkan oleh investor dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengendalikan para manajer.

Kusmayadi et al., (2015) juga menjelaskan bahwa *corporate governance* adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian *corporate governance* yang dikeluarkan beberapa pihak, baik dalam perspektif yang sempit (*shareholder*) dan perspektif yang luas (*stakeholders*), namun pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama.

Latifah dan kawan-kawan (2019) memaparkan bahwa *good corporate governance* adalah sebagai berikut :

“*Good Corporate Governance* pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan”.

OECD (*Organisation for Economic Cooperation and Development*) dalam Manasoh (2016) mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut :

“Corporate Governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The Corporate Governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, the managers, shareholders and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objective are set, and the means of ataining those objectives and monitoring performance.”

Kemudian FCGI (*Indonesia Corporate Governance Forum*) (2001) juga mendefinisikan *corporate governance* adalah:

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.”

Menurut Surat Keputusan Menteri No Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik *good corporate governance* pada , *corporate governance* didefinisikan sebagai berikut :

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”.

2.1.6.2 Prinsip Dasar *Corporate Governance*

Dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* terdapat pedoman pokok pelaksanaan dari prinsip-prinsip *good corporate governance* tersebut, yaitu :

1. Transparansi

- a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas

- a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate value*), dan strategi perusahaan.

- b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
 - c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
 - d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
 - e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.
3. **Responsibilitas**
- a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).
 - b. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.
4. **Independensi**

- a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
 - b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.
5. Kewajaran dan Kesetaraan
- a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
 - b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
 - c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

Salah satu tujuan diciptakannya *Corporate Governance* adalah untuk membuat pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan ini perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan yaitu, negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha (FCGI, 2001). Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah sebagai berikut :

1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan melaksanakan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten.
2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan *Good Corporate Governance* sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.
3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial secara objektif dan bertanggung jawab.

2.1.6.4 Pengukuran *Good Corporate Governance Disclosure*

Dalam penelitian ini pengukuran *good corporate governance disclosure* berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-431/BL/2012 Peraturan nomor X.K.6. Berdasarkan peraturan dan pedoman tersebut, diperoleh sebanyak 18 poin item yang terdiri dari pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, komite nominasi dan remunerasi, komite manajemen risiko, komite-komite lain yang dimiliki perusahaan, sekretaris perusahaan, audit internal, sistem pengendalian internal, manajemen risiko perusahaan, perkara penting yang dihadapi oleh perusahaan, pernyataan sanksi administrasi, akses informasi dan data perusahaan, kode etik dan

budaya perusahaan, sistem pelaporan pelanggaran, pernyataan penerapan *good corporate governance*, dan informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan *good corporate governance*. Delapan belas poin item tersebut memuat 99 item pengungkapan yang digunakan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah mengungkapkan informasi mengenai *corporate governance*. Item-item tersebut terangkum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Indeks Good Corporate Governance Disclosure

No	Klasifikasi	Item Pengungkapan
1	Pemegang Saham	<ul style="list-style-type: none"> a. Uraian mengenai hak pemegang saham. b. Pernyataan mengenai jaminan perlindungan hak atas pemegang saham perlakuan yang sama terhadap hak pemegang saham. c. Tanggal pelaksanaan RUPS. d. Hasil RUPS.
2	Dewan Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama-nama anggota Dewan Komisaris b. Status setiap anggota (komisaris independen atau komisaris bukan independen). c. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. d. Kebijakan dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris. e. Mekanisme dan kriteria kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris. f. Jumlah rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat gabungan dengan Direksi. g. Jumlah kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dalam rapat. h. Mekanisme pengambilan keputusan
3	Direksi	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama-nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing.

		<ul style="list-style-type: none"> b. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi. c. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. d. Mekanisme pengambilan wewenang. e. Mekanisme pendelegasian wewenang. f. Kebijakan dan jumlah remunerasi anggota Direksi, serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja perusahaan. g. Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi, termasuk rapat gabungan dengan Dewan Komisaris. h. Kehadiran setiap anggota Direksi dalam rapat. i. Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja anggota Direksi. j. Keputusan RUPS tahun sebelumnya dan realisasi pada tahun buku, serta alasan jika belum direalisasikan.
4	Komite Audit	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama b. Riwayat jabatan, pengalaman kerja, dan dasar hukum penunjukkan c. Riwayat pendidikan. d. Periode jabatan anggota Komite Audit. e. Pengungkapan independensi Komite Audit. f. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh Komite Audit. g. Tingkat kehadiran Komite Audit dalam rapat. h. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam (charter) Komite Audit.
5	Komite Nominasi dan Remunerasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. b. Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan. c. Periode jabatan anggota komite. d. Riwayat Pendidikan e. Uraian tugas dan tanggungjawab Komite Nominasi dan Remunerasi. f. Jumlah pertemuan yang dilakukan Komite Nominasi dan Remunerasi.

		<ul style="list-style-type: none"> g. Jumlah kehadiran rapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. h. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi. i. Independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
6	Komite Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama dan jabatan anggota Komite Manajemen Risiko. b. Riwayat hidup singkat setiap anggota Komite Manajemen Risiko. c. Uraian tugas dan tanggungjawab Komite Manajemen Risiko. d. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko. e. Jumlah kehadiran dalam setiap rapat. f. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Manajemen Risiko. g. Independensi anggota Komite Manajemen Risiko.
7	Komite-Komite Lain Yang Dimiliki Oleh Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama anggota komite. b. Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan. c. Riwayat pendidikan. d. Periode jabatan anggota komite. e. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite. f. Jumlah kehadiran setiap anggota dalam rapat. g. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite. h. Independensi anggota komite.
8	Sekretaris Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama Sekretaris Perusahaan. b. Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan. c. Riwayat pendidikan. d. Periode jabatan Sekretaris Perusahaan. e. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan.
9	Audit Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama anggota audit internal.

		<ul style="list-style-type: none"> b. Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan. c. Struktur dan kedudukan unit audit internal. d. Tugas dan tanggung jawab unit audit internal sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam (charter) unit audit internal. e. Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku.
10	Sistem Pengendalian Intern	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. b. Review atas efektivitas sistem pengendalian intern.
11	Manajemen Risiko Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko perusahaan. b. Jenis risiko dan cara pengelolaan risiko. c. Review atas efektivitas sistem manajemen risiko perusahaan.
12	Perkara penting yang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota direksi dan anggota dewan komisaris.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pokok perkara/gugatan. b. Status penyelesaian perkara/gugatan. c. Pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan.
13	Pernyataan Sanksi Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Informasi tentang sanksi administrasi yang dikenakan kepada Emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris dan direksi, oleh otoritas pasar modal dan otoritas lainnya pada tahun buku berakhir.
14	Akses Informasi dan Data Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan. b. Daftar penyebaran informasi ke publik.
15	Kode Etik dan Budaya Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pokok-pokok kode etik. b. Pokok-pokok budaya perusahaan (corporate culture). c. Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya.

		d. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi dewan komisaris, direksi, dan karyawan perusahaan.
16	Sistem Pelaporan Pelanggaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Cara penyampaian pelanggaran. b. Perlindungan bagi pelapor. c. Penanganan pengaduan. d. Pihak yang mengelola pengaduan. e. Hasil dari penanganan pengaduan.
17	Pernyataan Penerapan GCG	<ul style="list-style-type: none"> a. Keberadaan prinsip-prinsip GCG. b. Keberadaan pedoman pelaksanaan GCG dalam perusahaan. c. Kepatuhan terhadap pedoman GCG. d. Keberadaan Board Manual. e. Struktur tata kelola perusahaan. f. Hasil penerapan GCG selama setahun. g. Audit GCG (jasa atestasi) oleh eksternal auditor.
18	Informasi Penting	<ul style="list-style-type: none"> a. Visi perusahaan. b. Misi perusahaan. c. Nilai-nilai perusahaan. d. Kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya. e. Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Emiten atau perusahaan publik, antara lain jumlah, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, serta harga exercise. f. Uraian mengenai kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan pasar modal. g. Uraian mengenai transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan. h. Kejadian luar biasa yang telah dialami perusahaan dan dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan.

Jika struktur *good corporate governance* diungkapkan, maka diberikan poin 1, dan jika tidak diungkapkan maka diberikan poin 0.

Adapun rumusnya menurut Juan L (2008) :

$$GCGD = \frac{\text{Score Corporate Governance Disclosure}}{\text{Maximum Total Score}}$$

2.1.7 Teori *Triple Bottom Line*

Konsep TBL pertama kali diperkenalkan oleh Elkington pada tahun 1994. Elkington (1998) menjelaskan *triple bottom line* dalam bukunya yang berjudul *Cannibals With Forks* adalah *economic prosperity*, *environmental quality*, dan *social justice* atau konsep pengukuran kinerja suatu usaha secara “holistik” dengan memperhatikan ukuran kinerja ekonomis berupa perolehan profit, ukuran kepedulian sosial, dan pelestarian lingkungan (*Profit-People-Planet*).

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa perusahaan di Indonesia mulai menemukan keseimbangan antara orientasi keuntungan dan perbaikan lingkungan. Konsep TBL (*Triple Bottom Line*) dianggap sebagai pilar utama untuk membangun bisnis yang berkelanjutan dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan (Utomo dalam Idah, 2013). Dalam pembangunan berkelanjutan dibutuhkan tiga pilar penting dalam menjalankannya, tidak hanya satu atau pilar keuangan saja yang dianggap penting namun dengan adanya keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Maka dari itu konsep TBL ini memiliki 7 revolusi yang

terikat erat mengenai keberlanjutan, dapat dilihat pada gambar 2.1 (Henriques & Richardson, 2004:3).

Gambar 2.1 Tujuh Revolusi Keberlanjutan

Sumber : *The Triple Bottom Line, does it all add up?*

	Old Paradigm	→	New Paradigm
1 Markets	Compliance	→	Competition
2 Values	Hard	→	Soft
3 Transparency	Closed	→	Open
4 Life-cycle technology	Product	→	Function
5 Partnerships	Subversion	→	Symbiosis
6 Time	Wider	→	Longer
7 Corporate governance	Exclusive	→	Inclusive

Konsep TBL mengimplikasikan bahwa perusahaan harus lebih mengutamakan kepentingan *stakeholder* (semua pihak yang terlibat dan terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan perusahaan) daripada kepentingan *shareholder* (pemegang saham) saja. Kepentingan *stakeholder* ini dapat dirangkum menjadi tiga bagian yaitu kepentingan dari sisi keberlangsungan laba (*Profit*), sisi keberlangsungan masyarakat (*People*), dan sisi keberlangsungan lingkungan hidup (*Planet*).

Profit disini lebih dari sekadar keuntungan ekonomi. *Profit* di sini berarti menciptakan *fair trade* dan *ethical trade* dalam berbisnis. *People* menekankan pentingnya praktik bisnis suatu perusahaan yang mendukung kepentingan tenaga kerja. Secara lebih spesifik, konsep ini melindungi kepentingan tenaga kerja dengan menentang adanya eksploitasi yang mempekerjakan anak dibawah umur, menerapkan pembayaran upah yang wajar, lingkungan kerja yang aman dan jam kerja yang dapat ditoleransi. Bukan hanya itu, konsep ini juga meminta perusahaan untuk memperhatikan kesehatan dan pendidikan bagi tenaga kerja. *Planet* berarti

mengelola dengan baik penggunaan energi, terutama atas sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mengurangi hasil limbah produksi dan mengolah kembali limbah agar menjadi aman bagi lingkungan, mengurangi emisi CO₂ ataupun pemakaian energi, merupakan praktik yang banyak dilakukan oleh perusahaan yang telah menerapkan konsep ini (Felisia dan Amelia Limijaya 2014:18).

2.1.8 Sustainability Report Disclosure

2.1.8.1 Pengungkapan (*Disclosure*)

Kata *disclosure* memiliki arti keterbukaan atau tidak menutupi. Bila dikaitkan dengan pengungkapan informasi, *disclosure* mengandung pengertian bahwa pengungkapan informasi tersebut harus memberikan penjelasan yang cukup dan bisa mewakili keadaan yang sebenarnya dalam perusahaan. Dengan demikian, informasi harus lengkap, jelas, akurat dan dapat dipercaya dengan mencitrakan kondisi yang sedang dialami perusahaan, baik informasi keuangan maupun non-keuangan, sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan (Sri Yuni, 2015).

Kusumawati (2007) menyatakan bahwa studi-studi yang telah dilakukan selama ini, pengungkapan laporan tahunan dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pengungkapan umum dan pengungkapan tertentu, pengungkapan umum berupa pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku dalam hal ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang melebihi dari yang diwajibkan. Pengungkapan tertentu meliputi: *financial disclosure*, *social responsibility*

disclosure, environmental disclosure, termasuk pengungkapan aspek tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*).

Healy dan Palepu (dalam Simanjuntak dan Widiastuti, 2004) mengemukakan bahwa meskipun semua perusahaan publik diwajibkan untuk memenuhi pengungkapan minimum, perusahaan berbeda secara substansial dalam hal jumlah tambahan informasi yang diungkapkan ke pasar modal. Salah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas dan membantu investor dalam memahami strategi bisnis manajemen.

Evans (2003) dalam Suwardjono (2008) mengatakan pengungkapan sebagai berikut:

“Disclosure means supplying information in the financial statements themselves, the notes to the statements, and the supplementary disclosure associated with the statements. It does not extend to public or private statements by made management or information provided outside the financial statement.”

Kemudian Chariri dan Gozali (2007) menjelaskan bahwa kata pengungkapan (*disclosure*) memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan data, *disclosure* memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, *disclosure* mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktifitas suatu unit usaha.

Sedangkan dalam suwardjono (2014:578) pengertian pengungkapan (*disclosure*) adalah: "... penyediaan informasi dalam laporan keuangan, termasuk laporan sendiri, catatan atas laporan, dan pengungkapan tambahan yang terikat dengan laporan keuangan, itu tidak mencakup pernyataan publik atau swasta yang dibuat oleh manajemen atau informasi menyediakan diluar laporan keuangan."

Dalam penyajiannya, *disclosure* memiliki konsep. Menurut Chariri dan Ghozali (2007), terdapat 3 (tiga) konsep mengenai luas pengungkapan laporan keuangan, yaitu:

1. "Pengungkapan yang cukup (*Adequate Disclosure*)

Pengungkapan yang cukup adalah pengungkapan minimal yang harus dilakukan agar laporan keuangan tidak menyesatkan.

2. Pengungkapan yang Wajar

Pengungkapan yang wajar menunjukkan tujuan etis agar dapat memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi semua pemakai laporan keuangan.

3. Pengungkapan yang lengkap (*Full Disclosure*)

Pengungkapan yang lengkap menyajikan semua informasi yang relevan. Bagi beberapa pihak, pengungkapan lengkap ini diartikan sebagai penyajian informasi yang berlebihan, sehingga tidak bisa dikatakan layak (Hendriksen dan Brenda, 1992). Informasi yang berlebih-lebihan adalah berbahaya karena penyajian informasi dengan detail terlalu banyak justru akan menyembunyikan informasi yang penting dan membuat laporan keuangan menjadi sukar diinterpretasikan."

Jika suatu organisasi melakukan suatu pengungkapan (*disclosure*), maka pengungkapan itu terdapat tujuan yang ingin dicapai. Menurut Belkaoui dan Riahi (2011:338), tujuan dari pengungkapan dinyatakan sebagai berikut:

1. "Untuk menguraikan hal-hal yang diakui dan memberikan pengukuran yang relevan atas hal-hal tersebut diluar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan.

2. Untuk menguraikan hal-hal yang diakui dan untuk memberikan pengukuran yang bermanfaat bagi hal-hal tersebut.
3. Untuk memberikan informasi yang akan membantu investor dan kreditor menilai resiko dan potensial dari hal-hal yang diakui dan tidak diakui.
4. Untuk memberikan informasi penting yang memungkinkan pengguna laporan keuangan melakukan perbandingan dalam satu tahun dan diantara beberapa tahun.
5. Untuk memberikan informasi mengenai arus kas masuk atau arus kas keluar di masa depan.
6. Untuk membantu para investor menilai pengembalian dari investasi mereka”.

Kemudian menurut Suwardjono (2014:580), tujuan pengungkapan yaitu sebagai berikut:

1. “Tujuan Melindungi

Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih sehingga pemakai yang naif perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomik yang melandasi suatu pos statemen keuangan. Dengan kata lain, pengungkapan dimaksudkan untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan kurang terbuka.

2. Tujuan Informatif

Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut. Tujuan ini biasanya melandasi penyusunan standar akuntansi untuk menentukan tingkat pengungkapan.

3. Tujuan Kebutuhan Khusus

Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang memuat pengungkapan secara rinci.”

2.1.8.2 Pengertian dan Konsep Keberlanjutan

Menurut *US Environmental Protection Agency*, salah satu organisasi Amerika Serikat yang mengurus bidang lingkungan, keberlanjutan merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia secara langsung maupun tidak langsung pada lingkungan alam (Rusdiono, 2017).

Keberlanjutan dapat diartikan segala hal yang berkaitan dengan kapasitas ekosistem dan sebagai *input-output* dari konsumsi energi dan sumber daya. Keberlanjutan dianggap pengambilan keuntungan terhadap lingkungan oleh sekelompok dan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan sekarang dengan memperdulikan kelangsungan hidup generasi selanjutnya. Keberlanjutan memiliki arti produk dan jasa bukan hanya bersaing dari segi keunggulan gambar, kecepatan produksi, kekuatan, kemasan, dan lain-lain. Produk dan jasa tersebut juga harus bersaing dari segi pengurangan konsumsi, sumber daya, biaya pengiriman, polusi udara, pengikisan tanah, dan lain-lain yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan ((Paul Hawken, 1993:139) dalam Rusdiono 2017). Seperti halnya pembangunan, pembangunan dapat disebut berkelanjutan apabila memenuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup (Mukhlis, 2009).

Konsep keberlanjutan menurut Whitehead (2006) dalam (Umi, 2016) adalah sebagai hasil masyarakat yang memungkinkan generasi mendatang setidaknya tetap memiliki kekayaan alam yang sama dengan generasi yang ada pada saat ini. Ia menjelaskan bahwa keberlanjutan tidak berarti kemudian memerlukan

penghematan sumber daya yang sedemikian khusus, melainkan hanya memastikan kecukupan sumber daya (kombinasi dari sumber daya manusia, fisik, dan alam) untuk generasi mendatang, sehingga membuat standar hidup mereka setidaknya sama baiknya dengan generasi saat ini. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu adanya pengungkapan sebuah informasi terkait aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi sebagai bentuk transparansi dalam pelaporan kinerja perusahaan. Perusahaan harus mengumpulkan, mengendalikan, dan melaporkan ke pihak internal maupun eksternal tentang informasi keberlanjutan yang mereka miliki dalam sebuah laporan yang disebut *sustainability report*.

Konsep keberkelanjutan sendiri sudah menjadi hal penting dan komitmen secara global sejak hampir tiga dekade terakhir dalam memastikan kelangsungan hidup yang berkualitas pada masa yang akan datang. Konsep keberlanjutan pertama kali diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1997 dalam bukunya yang berjudul *Cannibals With Forks, The Triple Bottom Line Of 21st Century Business*. John Elkington sendiri merupakan salah satu pendiri dari perusahaan konsultan bisnis keberlanjutan terbesar didunia yang bernama SustainAbility yang berbasis di London, Washington, DC, dan Zurich. Elkington mengistilahkan konsep keberlanjutan dengan sebutan *Triple Bottom Line*, yaitu konsep yang mengusung bahwa disisi peraihan keuntungan (*profit*), perusahaan juga harus ikut andil dan bertanggung jawab dalam aspek lingkungan (*planet*) dan sosial (*people*). Karena menurutnya perusahaan memiliki tanggung jawab atas dampak positif maupun negatif yang ditimbulkan terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Menurut Wibisono (2007), *Triple bottom line* (3P) diuraikan sebagai

berikut:

1. “Profit (Keuntungan)

Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. Profit sendiri pada hakikatnya merupakan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak profit antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang dapat memberikan nilai tambah semaksimal mungkin.

2. People (Masyarakat Pemangku Kepentingan)

Menyadari bahwa masyarakat merupakan stakeholder penting bagi perusahaan, karena dukungan mereka, terutama masyarakat sekitar, sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan, maka sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada mereka. Perlu disadari bahwa operasi perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada masyarakat, karenanya perusahaan perlu untuk melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

3. Planet (Lingkungan)

Lingkungan adalah sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan kita. Hubungan kita dengan lingkungan adalah hubungan sebab akibat, di mana jika kita merawat lingkungan, maka lingkungan pun akan memberikan manfaat kepada kita sebaliknya, jika kita merusaknya, maka kita akan menerima akibatnya. Namun sayangnya, sebagian besar dari kita masih kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Hal ini disebabkan karena tidak adanya keuntungan langsung didalamnya. Maka, kita melihat banyak pelaku industri yang hanya mementingkan bagaimana menghasilkan uang sebanyak-banyaknya tanpa melakukan upaya apapun untuk melestarikan lingkungan. Padahal, dengan melestarikan lingkungan, mereka justru akan memperoleh keuntungan yang lebih, terutama dari sisi kesehatan, kenyamanan, disamping ketersediaan sumber daya yang lebih terjamin kelangsungannya.”

Dalam bahasa yang sama juga diungkapkan oleh majalah Investor, dimana perusahaan perlu membangun hubungan baik dengan semua *stakeholders*, tidak sekadar menjaga hubungan dengan pemegang saham (*shareholder*) dan memberi

bantuan sosial, tetapi perusahaan juga harus membina hubungan baik dengan konsumen, pemerintah, dan masyarakat luas (Menjaga kesinambungan, 2013 dalam Hatane Samuel, 2014).

2.1.8.3 Definisi *Sustainability Report*

Menurut Elkington (1997), *sustainability report* berarti laporan yang memuat tidak saja informasi kinerja keuangan tetapi juga informasi non-keuangan yang terdiri dari informasi aktivitas sosial dan lingkungan yang memungkinkan perusahaan bisa bertumbuh secara berkesinambungan (*sustainable performance*).

Chen dan Bouvain dalam (Khafid, 2012) memaparkan *sustainability report* sebagai berikut :

“*Sustainability report* merupakan sebuah istilah umum yang dianggap sinonim dengan istilah lainnya untuk menggambarkan laporan mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial, misalnya *triple bottom line*, laporan pertanggungjawaban perusahaan, dan lain sebagainya”.

Sustainability report adalah praktek pengukuran, pengungkapan dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan terhadap para *stakeholder* (GRI,2006: 3).

Menurut Effendi (2009:109), laporan keberlanjutan adalah:

“Laporan keberlanjutan (*sustainable report*) yaitu suatu laporan yang bersifat nonfinansial yang dapat dipakai sebagai acuan oleh perusahaan untuk melihat pelaporan dari dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan”. Dari pernyataan ini diusulkan tiga kaidah operasional dalam mendefinisikan keadaan dari *sustainability report* :

1. “Sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti ikan, tanah, dan air harus digunakan tidak lebih cepat dari waktu yang dibutuhkan sumber daya alam tersebut untuk diperbarui kembali;
2. Sumber daya alam yang tidak diperbarui seperti bahan bakar dari fosil dan mineral harus digunakan tidak lebih cepat dari kemampuan sumber daya alam yang dapat diperbarui untuk menggantikannya;
3. Polusi dan sampah harus dikeluarkan tidak lebih cepat daripada kemampuan alam untuk menyerapnya, mendaur ulangnya, atau bahkan memusnahkannya.”

2.1.8.4 Tujuan Pembuatan *Sustainability Report*

Menurut Jalal (2010) dalam Idah (2013), pembuatan dan penyebaran Sustainability Report (laporan keberlanjutan) memiliki tujuan sebagai berikut:

1. “Meningkatkan reputasi terkait dengan transparansi dan akuntabilitas.
2. Menjangkau berbagai pemangku kepentingan, agar mereka bisa mendapatkan informasi yang benar, sehingga perlu disebarluaskan melalui berbagai cara (internet, media cetak, stakeholder convening, dan sebagainya).
3. Membantu perusahaan untuk mengambil keputusan manajemen dalam memperbaiki kinerja pada indikator yang masih lemah. 4. Membantu investor untuk mengetahui kinerja perusahaan secara lebih menyeluruh.”

2.1.8.5 Manfaat *Sustainability Report*

Menurut *Sustainability Report Guidelines G3*, menjelaskan bahwa manfaat dari *sustainability report* adalah sebagai berikut :

1. Patok banding dan pengukuran kinerja keberlanjutan yang menghormati hukum, norma, kode, standar kinerja, dan inisiatif sukarela,

2. Menunjukkan bagaimana organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh harapannya mengenai pembangunan berkelanjutan,
3. Membandingkan kinerja dalam sebuah organisasi dan di antara berbagai organisasi dalam waktu tertentu.

Menurut *World Business Council for Sustainable Development* dalam (Wijayanti, 2016), manfaat yang didapat dari *sustainability report* antara lain :

1. Memberikan informasi kepada *stakeholders* (pemegang saham, anggota komunitas lokal, pemerintah) dan meningkatkan prospek perusahaan, serta membantu mewujudkan transparansi;
2. Membantu membangun reputasi sebagai alat yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan *brand value*, *market share*, dan loyalitas konsumen jangka panjang;
3. Menjadi cerminan bagaimana perusahaan dalam mengelola risikonya;
4. Digunakan sebagai stimulasi *leadership thinking* dan *performance* yang didukung dengan semangat kompetisi;
5. Mengembangkan dan memfasilitasi pengimplementasian sistem manajemen yang lebih baik dalam mengelola dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial;
6. Mencerminkan secara langsung kemampuan dan kesiapan perusahaan untuk memenuhi keinginan pemegang saham untuk jangka panjang; dan
7. Membantu membangun ketertarikan para pemegang saham dengan visi jangka panjang dan membantu mendemonstrasikan bagaimana meningkatkan nilai perusahaan yang terkait dengan isu sosial dan lingkungan.

2.1.8.6 Pengungkapan *Sustainability Report*

Publikasi *sustainability report* di Indonesia belum bersifat wajib (*mandatory disclosure*) tetapi masih bersifat sukarela (*voluntary disclosure*). Hal ini selaras dengan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 1 yang menyatakan :

“Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup

memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan”.

Kendatipun begitu, publikasi *sustainability report* di Indonesia sudah menjadi tren dan terus mengalami perkembangan. Salah satu faktor pendorongnya adalah adanya penghargaan tahunan untuk perusahaan yang mempublikasikan *sustainability report* yang diadakan oleh lembaga *National Center for Sustainability Report* (NCSR). Selain itu, menurut Josua Tarigan dan Hatane Samuel (2014) faktor yang membuat perusahaan mempublikasikan *sustainability report* adalah menguatnya tekanan *stakeholders* yang mendorong perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, akuntabel, dan praktik tata kelola perusahaan yang baik.

2.1.8.7 Prinsip *Sustainability Report Disclosure*

Pengungkapan *sustainability report* disusun sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh GRI, yang mana saat ini berstandar GRI-G4. Penggunaan prinsip tersebut dapat menghasilkan informasi yang terdapat didalam *sustainability report* lebih berkualitas dan memadai untuk membantu pada *stakeholders* dalam menilai perusahaan dan mengambil keputusan. Adapun prinsip-prinsip sesuai dengan GRI-G4 adalah sebagai berikut:

a. “Prinsip-Prinsip untuk Menentukan Konten Laporan

Prinsip-prinsip untuk menentukan konten laporan *Sustainability Report* (GRI G4) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelibatan Pemangku Kepentingan

Organisasi harus mengidentifikasi para pemangku kepentingannya, dan menjelaskan bagaimana organisasi telah menanggapi harapan dan kepentingan wajar dari mereka. Pemangku kepentingan yang berinvestasi diorganisasi serta yang memiliki hubungan dalam bentuk lain dengan organisasi. Harapan dan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan merupakan acuan utama dalam banyak pengambilan keputusan dalam menyiapkan laporan.

2. Konteks Keberlanjutan

Laporan harus menyajikan kinerja organisasi dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas. Informasi mengenai kinerja harus disertakan sesuai konteks. Pertanyaan yang mendasari pelaporan keberlanjutan adalah bagaimana sebuah organisasi berkontribusi, atau bertujuan untuk memberikan kontribusi dimasa mendatang, terhadap peningkatan atau penurunan kondisi, pengembangan, dan tren ekonomi, lingkungan, serta sosial ditingkat lokal, regional, atau global. Hanya melaporkan tentang kecenderungan dalam kinerja individual (atau efisiensi organisasi) tidak dapat menjawab pertanyaan mendasar ini. Oleh karena itu, laporan harus berupaya untuk menyajikan kinerja dalam kaitannya dengan konsep keberlanjutan yang lebih luas. Hal ini termasuk mengenai pembahasan kinerja organisasi dalam konteks keterbatasan-keterbatasan dan permintaan yang terletak pada sumber daya lingkungan atau sosial di tingkat sektor, lokal, regional, maupun global.

3. Materialitas

Laporan harus mencakup aspek yang:

- a. Mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan dari organisasi; atau
- b. Secara substansial memengaruhi asesmen dan keputusan pemangku kepentingan.

Organisasi dihadapkan dengan beragam topik yang dapat dilaporkan. Topik-topik yang relevan adalah yang secara wajar dapat dianggap penting untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial organisasi atau memengaruhi keputusan pemangku kepentingan, dan oleh karena itu sudah seharusnya berpotensi pantas disertakan dalam laporan. Materialitas adalah ambang batas di mana aspek menjadi cukup penting untuk dilaporkan.

4. Kelengkapan

Laporan harus berisi cakupan aspek Material dan Boundary, cukup untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan

sosial yang signifikan, serta untuk memungkinkan pemangku kepentingan dapat menilai kinerja organisasi dalam periode pelaporan. Kelengkapan terutama mencakup dimensi cakupan, batasan, dan waktu. Konsep kelengkapan juga dapat digunakan untuk merujuk pada praktik pengumpulan informasi dan apakah penyajian informasi tersebut wajar dan sesuai.

b. Prinsip- Prinsip untuk Menentukan Kualitas Laporan Adapun prinsip-prinsip kualitas informasi dalam laporan *Sustainability Report* (GRI G4) adalah sebagai berikut:

1. Keseimbangan

Laporan harus mencerminkan aspek-aspek positif dan negatif dari kinerja organisasi untuk memungkinkan dilakukannya asesmen yang beralasan atas kinerja organisasi secara keseluruhan. Keseluruhan penyajian konten laporan harus memberikan gambaran yang objektif tentang kinerja organisasi. Laporan harus menghindari format pemilihan, penghilangan, atau penyajian yang terlalu berlebihan atau tidak tepat dalam memengaruhi keputusan atau asesmen dari pembaca laporan.

2. Komparabilitas

Organisasi harus memilih, mengumpulkan, dan melaporkan informasi secara konsisten. Informasi yang dilaporkan harus disajikan dengan cara yang memungkinkan para pemangku kepentingan menganalisis perubahan kinerja organisasi dari waktu ke waktu, dan yang dapat mendukung analisis relatif terhadap organisasi lain. Komparabilitas diperlukan untuk mengevaluasi kinerja. Pemangku kepentingan yang menggunakan laporan harus dapat membandingkan informasi yang dilaporkan mengenai kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial terhadap kinerja organisasi di masa lalu, terhadap tujuan organisasi, dan pada tingkat yang memungkinkan, terhadap kinerja organisasi lain.

3. Akurasi

Informasi yang dilaporkan harus cukup akurat dan terperinci bagi para pemangku kepentingan untuk dapat menilai kinerja organisasi. 61 Respon atas DMA dan Indikator ekonomi, lingkungan, dan sosial dapat disampaikan melalui berbagai cara, mulai dari tanggapan kualitatif sampai pengukuran kuantitatif yang detail. Karakteristik yang menentukan keakuratan bervariasi sesuai dengan sifat informasi dan pengguna informasi tersebut.

4. Ketepatan Waktu

Organisasi harus membuat laporan dengan jadwal yang teratur sehingga informasi tersedia tepat waktu bagi para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang tepat. Manfaat

informasi terkait erat dengan kapan informasi tersebut disajikan kepada para pemangku kepentingan sehingga mereka dapat mengintegrasikannya secara efektif dalam pengambilan keputusan. Waktu penerbitan mengacu pada keteraturan pelaporan serta kedekatannya dengan peristiwa aktual yang dijelaskan dalam laporan.

5. Kejelasan

Organisasi harus membuat informasi tersedia dengan cara yang dapat dimengerti dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang menggunakan laporan. Informasi harus disajikan dengan cara yang dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan yang memiliki pemahaman yang wajar mengenai organisasi dan aktivitasnya.

6. Keandalan

Organisasi harus mengumpulkan, mencatat, menyusun, menganalisis, dan mengungkapkan informasi serta proses yang digunakan untuk menyiapkan laporan agar dapat diuji, dan hal itu akan menentukan kualitas serta materialitas informasi. Para pemangku kepentingan harus memiliki keyakinan bahwa laporan dapat diuji untuk dapat menetapkan kebenaran isinya dan sejauh mana prinsip-prinsip pelaporan telah diterapkan dengan benar.”

2.1.8.8 Proses Penyajian *Sustainability Report*

Menurut Effendi (2016:212) proses penyajian *sustainability report* dilakukan melalui 5 mekanisme, yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan merumuskan kebijakan terkait pembangunan berkelanjutan, kemudian mempublikasikan kebijakan tersebut beserta dampaknya,
2. Tekanan pada rantai pemasok (*supply chain*). Harapan publik terhadap perusahaan untuk menyediakan produk dan layanan yang ramah lingkungan juga menekan perusahaan untuk mengembangkan standar kinerja dan laporan keberlanjutan bagi pemasok dan rantai toko mereka,
3. Keterlibatan pemangku kepentingan,
4. *Voluntary codes*. Dalam mekanisme ini, masyarakat menuntut perusahaan merumuskan seluruh aspek kinerja keberlanjutan dan mewajibkan perusahaan membuat laporan keberlanjutan. Jika perusahaan belum menerapkannya, harus memberikan instruksi,

5. Mekanisme lain adalah *rating* dan *benchmarking*, pajak, dan subsidi, izin-izin yang dapat diperdagangkan, serta kewajiban dan larangan.

Laporan keberlanjutan dapat dipublikasikan secara terpisah atau diintegrasikan ke dalam laporan tahunan. Beberapa alasan mengapa perusahaan memberikan laporan keberlanjutan terpisah dari laporan tahunan adalah sebagai berikut :

1. Laporan keberlanjutan sebagai alat komunikasi bagi manajemen dengan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pesan bahwa perusahaan telah menjalankan pengembangan yang berkelanjutan,
2. Memperoleh *positif image* (citra positif) dari pemangku kepentingan,
3. Pencarian legitimasi dari pemangku kepentingan.

4. **2.1.8.9 Indikator *Sustainability Report Disclosure***

5. *Sustainability Report* menyajikan informasi terkait aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan suatu perusahaan. Hal inipun sangat berguna bagi *stakeholders* dalam pengambilan keputusan. Dalam pengungkapan *sustainability report*, ada standar tertentu yang menjadi pedoman perusahaan, juga sebagai tolak ukur bagi *stakeholder* dalam mengukur pengungkapan *sustainability report* perusahaan. *Global Report Initiative* (GRI) adalah lembaga yang mengembangkan dan membuat standar untuk *sustainability report* yang saat ini sudah mengeluarkan standar baru yaitu *GRI Standard* yang meliputi 3 kategori yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial mencakup praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggungjawab atas produk dengan total kinerja indikator secara keseluruhan terdapat 113 item penilaian *sustainabilityreport*. Semakin tinggi tingkat indikator *sustainability report* perusahaan dengan standar

GRI, maka semakin tinggi pula tingkat kualitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Berikut adalah item-item yang harus diungkapkan perusahaan mengikuti *GRI Standard* :

6. **Tabel 2.2**

7. **Indeks Pengungkapan *Sustainability Report* Berdasarkan Standar GRI *Standard***

No.	Pengungkapan GRI	Deskripsi Pengungkapan
1. GRI 102		
Profil Organisasi		
1	GRI 102-1	Nama organisasi
2	GRI 102-2	Kegiatan, Merek, Produk, dan Jasa
3	GRI 102-3	Lokasi kantor Pusat
4	GRI 102-4	Lokasi Operasi
5	GRI 102-5	Kepemilikan dan bentuk hukum
6	GRI 102-6	Pasar yang dilayani
7	GRI 102-7	Skala Organisasi
8	GRI 102-8	Informasi mengenai karyawan dan pekerja lain
9	GRI 102-9	Rantai Pasokan
10	GRI 102-10	Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya
11	GRI 102-11	Pendekatan atau prinsip pencegahan
12	GRI 102-12	Inisiatif eksternal
13	GRI 102-13	Keanggotaan asosiasi
Strategi		
14	GRI 102-14	Pernyataan dari pembuat keputusan senior
15	GRI 102-15	Dampak Utama, Risiko, dan Peluang
Etika dan Integritas		

15	GRI 102-16	Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku
Tata Kelola		
16	GRI 102-18	Struktur tata kelola
Keterlibatan Pemangku Kepentingan		
17	GRI 102-40	Daftar kelompok pemangku kepentingan
18	GRI 102-41	Perjanjian perundingan kolektif
19	GRI 102-42	Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan
20	GRI 102-43	Pendekatan terhadap keterlibatan pemangku kepentingan
21	GRI 102-44	Topik utama dan masalah yang dikemukakan
Praktik Pelaporan		
22	GRI 102-45	Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi
23	GRI 102-46	Menetapkan isi laporan dan batasan topic
24	GRI 102-47	Daftar topik material
25	GRI 102-48	Penyajian kembali informasi
26	GRI 102-49	Perubahan dalam pelaporan
27	GRI 102-50	Periode pelaporan
28	GRI 102-51	Tanggal laporan terbaru
29	GRI 102-52	Siklus pelaporan
30	GRI 102-53	Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan
31	GRI 102-54	Klaim bahwa pelaporan sesuai dengan standar GRI
32	GRI 102-55	Indeks isi GRI
33	GRI 102-56	Assurance dari pihak eksternal
2. GRI 103		
Pendekatan Manajemen		
1	GRI 103-1	Penjelasan topik material dan batasannya
2	GRI 103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya
3	GRI 103-3	Evaluasi pendekatan manajemen
3. GRI 200		

Performa Ekonomi		
1	GRI 201-1	Nilai ekonomi langsung yang diatribusikan
2	GRI 201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim
3	GRI 201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya
4	GRI 201-4	Bantuan finansial yang diterima pemerintah
Keberadaan Pasar		
5	GRI 202-1	Rasio standar upah karyawan entry level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional
6	GRI 202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal
Dampak Ekonomi Tidak Langsung		
7	GRI 203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan
8	GRI 203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan
Praktik Pengadaan		
9	GRI 204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal
Anti Korupsi		
10	GRI 205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi
11	GRI 205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan prosedur anti- korupsi
12	GRI 205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
Perilaku Anti Persaingan		
13	GRI 206-1	Langkah- langkah hukum untuk perilaku anti persaingan, praktik anti- trust dan monopoli.
4. GRI 300		
Material		
1	GRI 301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume

2	GRI 301-2	Material input dari daur ulang yang digunakan
3	GRI 301-3	Produk reclaimed dan material kemasannya
Energi		
4	GRI 302-1	Konsumsi energi dalam organisasi
5	GRI 302-2	Konsumsi energi di luar organisasi
6	GRI 302-3	Intensitas energi
7	GRI 302-4	Pengurangan konsumsi energi
8	GRI 302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa
Air		
9	GRI 303-1	Pengambilan air berdasarkan sumber
10	GRI 303-2	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
11	GRI 303-3	Daur ulang dan penggunaan air kembali
Keanekaragaman Hayati		
12	GRI 304-1	Lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
13	GRI 304-2	Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati
14	GRI 304-3	Habitat yang dilindungi atau direstorasi
15	GRI 304-4	Spesies daftar merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi
Emisi		
16	GRI 305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung
17	GRI 305-2	Emisi GRK (Cakupan 2) tidak langsung
18	GRI 305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya
19	GRI 305-4	Intensitas emisi GRK
20	GRI 305-5	Pengurangan emisi GRK
21	GRI 305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS).

22	GRI 305-7	Nitrogen oksida, sulfur oksida, dan emisi udara yang signifikan lainnya
Air Limbah dan Limbah		
23	GRI 306-1	Pelepasan air berdasarkan kualitas dan tujuan
24	GRI 306-2	Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
25	GRI 306-3	Tumpahan yang signifikan
26	GRI 306-4	Pengangkutan limbah berbahaya.
27	GRI 306-5	Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limpahan air
Kepatuhan Lingkungan		
28	GRI 307-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup
Penilaian Lingkungan Pemasok		
29	GRI 308-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan
30	GRI 308-2	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
5. GRI 3400		
Kepegawaian		
1	GRI 401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan.
2	GRI 401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau cuti paruh waktu
3	GRI 401-3	Cuti melahirkan
Hubungan Tenaga Kerja atau Manajemen		
4	GRI 402-1	Periode pemberitahuan terkait perubahan operasional
Kesehatan dan Keselamatan Kerja		
5	GRI 403-1	Perwakilan pekerja dalam komite resmi gabungan manajemen- pekerja untuk kesehatan dan keselamatan
6	GRI 403-2	Jenis kecelakaan kerja dan tingkat kecelakaan kerja, penyakit akibat pekerjaan, hari kerja yang hilang, dan ketidakhadiran, serta jumlah kematian terkait pekerjaan

7	GRI 403-3	Para pekerja dengan risiko kecelakaan atau penyakit berbahaya tinggi terkait dengan pekerjaan mereka
8	GRI 403-4	Topik kesehatan dan keselamatan tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat buruh
Pelatihan dan Pendidikan		
9	GRI 404-1	Rata-rata pelatihan per tahun per karyawan
10	GRI 404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan
11	GRI 404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier
Keanekaragaman dan Kesempatan Kerja		
12	GRI 405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan
13	GRI 405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan dengan laki-laki
Non Diskriminasi		
14	GRI 406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan dan dilakukan
Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif		
15	GRI 407-1	Operasi dari pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko
Pekerja Anak		
16	GRI 408-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak
Kerja Paksa atau Wajib Kerja		
17	GRI 409-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja
Praktik Keamanan		
18	GRI 410-1	Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
Hak-Hak Masyarakat Adat		

19	GRI 411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat
Penilaian Hak Asasi Manusia		
20	GRI 412-1	Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia tau penilaian dampak
21	GRI 412-2	Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
22	GRI 412-3	Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia
Masyarakat Lokal		
23	GRI 413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan
24	GRI 413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal
Penilaian Sosial Pemasok		
25	GRI 414-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial
26	GRI 414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
Kebijakan Publik		
27	GRI 415-1	Kontribusi publik
Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan		
28	GRI 416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan kerja dari berbagai kategori produk dan jasa
29	GRI 416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa
Pemasaran dan Pelabelan		
30	GRI 417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa.
31	GRI 417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait pelabelan dan informasi produk dan jasa

32	GRI 417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran.
Privasi Pelanggan		
33	GRI 418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggan dan hilangnya data pelanggan
Kepatuhan Ekonomi		
34	GRI 419-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan dibidang sosial dan ekonomi

8. Sumber : *globalreporting.org*

2.1.8.10 Pengukuran *Sustainability Report*

Menurut Wijayanti (2016) perhitungan SRDI dilakukan dengan memberikan skor 1 jika suatu indikator diungkapkan, dan 0 jika tidak diungkapkan. Setelah dilakukan pemberian skor pada seluruh indikator, skor tersebut kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total skor untuk setiap perusahaan.

Adapun rumus untuk pengukuran *sustainability report disclosure index* (SRDI) (Wijayanti, 2016) sebagai berikut :

$$SRDI = \left(\frac{n}{k} \right)$$

Keterangan :

SRDI : *Sustainability Report Disclosure Index Perusahaan*

n : jumlah item yang diungkapkan perusahaan

k : jumlah item yang diharapkan

2.1.9 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis juga memperoleh data dan informasi dari beberapa penelitian sebelumnya guna mempermudah proses penelitian. Berikut penelitian-penelitian terkait *sustainability report* :

Table 2.3

Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Persamaa Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Erna Wijayana dan Kurniawati (2018)	Pengaruh <i>Corporate Governance, Return on Asset</i> dan Umur Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	<p>Independe: <i>ASEAN CG Scorecard, Return on Asset, dan Umur Perusahaan</i></p> <p>Dependen : <i>Sustainabilit y Report</i></p>	Membahas mengenai <i>Return on Asset</i> dan <i>Sustainabil ity Report</i>	Penulis memakai kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komite audit sebagai yang diprosikan dari <i>good corporate governance</i>	<p>Penelitian ini mendapatkan hasil sebagai berikut :</p> <p>a. <i>Corporat e governance</i> yang diukur dengan <i>ASEACG Scorecard</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan <i>sustainability report</i></p> <p>b. <i>Return on Asset</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan <i>sustainability report</i></p>

						c. Umur perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan <i>sustainability report</i>	
2	Ferra Novitaningrum dan Dheasey Amboningtyas (2017)	<i>Analysis of Good Corporate Governance Principles (Institutional Ownership, Managerial Ownership, Independent Commissioners, And Audit Committee) To Disclosure Sustainability Report Through Roa As Moderating Variables (Study on Manufacturing Companies of Various Sectors Listed on IDX Period Year 2011-2016)</i>	Independen : Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Komite Audit	Dependen: <i>Sustainability Report</i>	Membahas mengenai Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, dan <i>Sustainability Report</i>	Penulis memakai Dewan Komisaris sebagai yang diproksikan dari <i>good corporate governance</i> dan <i>return on asset</i> sebagai variabel independen	<p>Hasil pengujian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>sustainability report</i>.</p> <p>b. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap <i>sustainability report</i>.</p> <p>c. Komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>sustainability report</i>.</p>

						<p>d. Komite audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap sustainability report.</p>
						<p>e. ROA berpengaruh positif dan signifikan dalam memperkuat pengaruh kepemilikan institusi terhadap sustainability report</p>
			Variabel Moderasi: <i>Return On Asset</i>			<p>f. ROA berpengaruh positif dan tidak signifikan dalam memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial sustainability report.</p>
						<p>g. ROA berpengaruh positif dan tidak signifikan dalam memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap</p>

						<i>sustainability report</i>
						h. ROA berpengaruh negatif dan signifikan dalam memperlemah pengaruh komite Audit terhadap <i>sustainability report</i> .
3	Rimah Afsari, I Gusti Ayu Purnamawati, dan Made Aristia Prayudi (2017)	Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusioanl Terhadap Luas Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> (Studi Empiris Perusahaan yang Mengikuti ISRA Periode 2013-2015)	Independen: Leverage, Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Kepemilikan Institusional Dependen : <i>Sustainability Report</i>	Membahas Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan <i>Sustainability Report</i>	Penulis menggunakan <i>Return on Asset</i> , Kepemilikan Manajerial dan Dewan Komisaris sebagai yang diprosikan dari <i>good corporate governance</i>	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan : a. Leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap luas pengungkapan <i>sustainability report</i> b. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan <i>sustainability report</i>

						<p>a. Komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan <i>sustainability report</i></p> <p>b. Kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan <i>sustainability report</i></p>
4	Fandi Ahmad (2014)	<p>Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan <i>sustainability Report</i> (Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)</p>	<p>Independen: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Tipe Industri.</p> <p>Dependen : Pengungkapan <i>Sustainability Report</i></p>	Membahas mengenai Profitabilitas dan <i>Sustainability report</i>	<p>Penulis menggunakan mekanisme GCG yang diprosikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite audit</p>	<p>Berdasarkan hasil dari penelitian ini bahwa ukuran perusahaan, tipe industri, dan profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> perusahaan.</p>

5	Wanda Adila (2016)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan <i>sustainability Report</i> (SR)	Independen: Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan.	Membahas mengenai Komite Audit, Profitabilitas, dan <i>Sustainability report</i>	Penulis menggunakan Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial	Dalam penelitian ini variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> adalah profitabilitas. Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> adalah dewan komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan
			Dependen : Pengungkapan <i>sustainability Report</i>			
6	Mega Putri Yustia Sari (2013)	Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan	Independen: Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Aktivitas Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Dewan Direksi dan Dewan	Membahas Komite Audit, Dewan Komisaris, dan <i>Sustainability Report</i>	Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan ROA	Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

		<i>sustainability Report</i>	Komisaris Independen			
			Dependen : <i>Sustainability report</i>			<p>a. Variabel independen yaitu profitabilitas, likuiditas, leverage, aktivitas perusahaan, ukuran perusahaan, komite audit, dewan direksi dan dewan komisaris independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>.</p> <p>b. Namun jika variabel profitabilitas saja berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>.</p> <p>c. Kemudian variabel komite audit dan dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan</p>

						terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> .
						c. Sedangkan variabel likuiditas, leverage, aktivitas perusahaan, ukuran perusahaan dan dewan direksi tidak menunjukkan pengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> perusahaan.
7	Azwir Nasir, Elfi Ilham, dan Vadela Ima Utara (2014)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> Pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar	Independen: <i>Return on Asset, Current Ratio, Inventory Turnover, Size, Debt to Equity Ratio</i> , Komite Audit, Dewan Direksi, dan <i>Governance Committee</i>	Membahas <i>Return On Asset</i> , Komite Audit, dan <i>Sustainability Report</i>	Penulis menggunakan Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Dewan Komisaris	Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa: <i>Return on Asset, Debt to Equity Ratio dan Governance Committee</i> Berpengaruh signifikan terhadap <i>sustainability Report</i> , sedangkan

			<p>Dependen : Pengungkapan Laporan Berkelanjutan</p>			<p><i>Current Ratio, Inventory Turnover, Size, Komite Audit, dan Dewan Direksi, tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan (sustainability Report).</i></p>
8	Idah (2013)	<p><i>Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan Dalam Pengungkapan Sustainability Report</i></p>	<p>Independen : Dewan Komisaris, Komite Audit, Dewan Direksi, <i>Governance Committee</i>, Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i>, Aktivitas Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan</p>	<p>Membahas Dewan Komisaris, Komite Audit, Profitabilitas, dan <i>Sustainability Report</i></p>	<p>Penulis menggunakan Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dewan direksi, <i>governance committee</i>, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berperan positif terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>. Sedangkan dewan komisaris, komite audit, likuiditas, <i>leverage</i>, dan aktivitas perusahaan tidak memiliki peran dalam pengungkapan <i>sustainability report</i>.</p>

			Dependen : <i>Sustainability report</i>			
9	T. Ong dan H.G Djajadikerta (2018)	<i>Impact of Corporate Governance on Sustainability Report: Empirical Study in The Australia Resources Industry</i>	Independen: <i>Corporate Governance</i>	Membahas <i>corporate governance</i> dan <i>sustainability report</i>	Penulis menggunakan Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA.	<i>Significant positive correlations were found to exist between sustainability disclosures and the attributes of company board</i>
			Dependen : <i>Sustainability Report</i>			<i>Composition that support a better corporate governance mechanism. These attributes include the proportion of independent directors, multiple directorships and women directors on the board. Companies without CEO duality and those with a sustainability committee are more likely to disclose a greater extent</i>

						<i>of sustainability information.</i>
10	Abdul Aziz (2014)	Analisis Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan di Indonesia Periode 2011-2012)	Independen : Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit, Kepemilikan Saham Manajerial, Kepemilikan Saham Institusional, Kepemilikan Saham Terkonsentrasi	Membahas Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Saham Manajerial, Kepemilikan Saham Institusional dan <i>Sustainability Report</i>	Penulis menggunakan Profitabilitas yang diprosikan dengan ROA	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit, Kepemilikan saham manajerial, Kepemilikan saham institusional, dan Kepemilikan saham terkonsentrasi serta Ukuran perusahaan secara bersama-sama mempengaruhi pengungkapan SR hanya sebesar 29,9%. Dengan demikian faktor-faktor karakteristik GCG tersebut di atas masih belum dapat meningkatkan mekanisme

						pengawasan dengan baik untuk mendorong pengungkapan SR.
			Dependen : <i>Sustainability Report</i>			
11	K. Baba Adiatma dan I. Ketut Suryanawa (2018)	Pengaruh Tipe Industri, Kepemilikan Saham Pemerintah, Profitabilitas Terhadap <i>Sustainability Report</i>	Independen : Tipe Industri, Kepemilikan Saham Pemerintah, Profitabilitas	Membahas Profitabilitas dan <i>Sustainability Report</i>	Penulis menggunakan Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris, dan Komite Audit	Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: a. <i>sustainability report</i> secara signifikan dipengaruhi oleh tipe industri pada perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2016.

			Dependen : sustainability Report			b. kepemilikan saham pemerintah tidak berpengaruh terhadap <i>sustainability report</i> pada perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2016.
						c. profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>sustainability report</i> pada perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2016.
12	Sri Wahjuni Latifah, Muhamad Fahminuddin Rosyid, Lilik Purwanti, dan Tri Wahyu Oktavendi (2019)	<i>Good Corporate Governance, Kinerja Keuangan Dan Sustainability Report</i> (yang listing di BEI)	Independen: Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, Profitabilitas	Membahas Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Profitabilitas, dan <i>Sustainability Report</i>	Penulis menggunakan Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris	Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Dewan direksi, komite audit dan ROA berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> pada perusahaan. Sedangkan kepemilikan saham manjerial dan komisaris independen

						tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> pada perusahaan.
			Dependen : <i>Sustainability Report</i>			
13	Ni'matul Hasanah, Dhaniel Syam, dan A. Waluya Jati (2015)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap Pengungkapan <i>sustainability report</i> pada Perusahaan di Indonesia	Independen : Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit	Membahas Dewan Komisaris, Komite Audit, dan <i>Sustainability Report</i>	Penulis menggunakan Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional	Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel independennya rata-rata tingkat kehadiran anggota dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit dalam rapat tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> .
			Dependen : <i>Sustainability Report</i>			

14	Adistira Sri Aulia dan Dhaniel Syam (2013)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Praktek Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> Dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia	Independen: Ukuran perusahaan (total aktiva), leverage (total kewajiban/e kuitas pemegang saham), profitabilitas (laba bersih / pendapatan), dan jenis perusahaan (diklasifikasi kan dalam <i>high profile</i> dan <i>low profile</i>).	Membahas Profitabilitas dan <i>Sustainability Report</i>	Penulis menggunakan Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris, dan Komite Audit	Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa size perusahaan dan tipe perusahaan berpengaruh signifikan terhadap praktek pengungkapan sustainability report, sedangkan leverage dan tingkat profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktek pengungkapan <i>sustainability report</i> perusahaan.
			Dependen : Kelengkapan pengungkapan indeks <i>sustainability report</i> (<i>economic disclosure, social disclosure, dan environmental disclosure</i>)			

15	Faizah Naila Sofa dan Novita WeningTya s Respati (2020)	Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017)	Independen: DewanDireksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas (ROA), Ukuran Perusahaan	Membahas Komite Audit, Profitabilitas (ROA), dan <i>Sustainability Report</i>	Penulis menggunakan Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional	Hasil dari penelitian ini membuktikan Dewan Direksi dan Ukuran Perusahaan mempengaruhi <i>Sustainability report</i> . Sedangkan Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Profitabilitas tidak mempengaruhi pengungkapan <i>Sustainability Report</i>
			Dependen : <i>Sustainability Report</i>			
16	Annisa Fauziah Afifulhaq (2018)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Aktivitas Perusahaan, dan Corporate Governance Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> (Studi Empiris Pada	Independen : Profitabilitas (ROA), Leverage (DER), Likuiditas (CR), Aktivitas Perusahaan (IT), Komite Audit,	Membahas Profitabilitas (ROA), Komite Audit, dan <i>Sustainability Report</i>	Penulis menggunakan Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Dewan Komisaris	Berdasarkan hasil penelitian, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Rasio Profitabilitas (ROA) dan Jumlah Rapat Dewan Direksi (DD) berpengaruh

		Perusahaan Non Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2015)	Dewan Direksi			signifikan terhadap pengungkapan sustainability report, sedangkan Rasio Leverage (DER), Rasio Likuiditas (CR), Rasio Aktivitas (IT), dan Jumlah Rapat Komite Audit (KA) tidak berpengaruh terhadap praktik pengungkapan <i>sustainability report</i> .
			Dependen : <i>Sustainability Report</i>			
17	Adimulya Nurrahman dan Sudarno (2013)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	Independen : Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Asing	Membahas Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan <i>Sustainability Report</i>	Penulis menggunakan Profitabilitas (ROA), Dewan Komisaris, dan Komite Audit	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

			Dependen : <i>Sustainability Report</i>			Kepemilikan saham institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas pengungkapan sustainability report. Perusahaan dengan kepemilikan saham institusi yang lebih besar memiliki probabilitas yang lebih besar untuk mengungkapkan <i>sustainability report</i> .
18	Annisa Fauziah Afifulhaq (2018)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Aktivitas Perusahaan, dan Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2015)	Independen: Profitabilitas (ROA), Leverage (DER), Likuiditas (CR), Aktivitas Perusahaan (IT), Komite Audit, Dewan Direksi	Membahas Profitabilitas (ROA), Komite Audit, dan <i>Sustainability Report</i>	Penulis menggunakan Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Dewan Komisaris	Berdasarkan hasil penelitian, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Rasio Profitabilitas (ROA) dan Jumlah Rapat Dewan Direksi (DD) berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> , sedangkan Rasio Leverage (DER), Rasio

						Likuiditas (CR), Rasio Aktivitas (IT), dan Jumlah Rapat Komite Audit (KA) tidak berpengaruh terhadap praktik pengungkapan <i>sustainability report</i> .
			Dependen : <i>Sustainability Report</i>			
19	Adimulya Nurrahman dan Sudarno (2013)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	Independen: Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Asing	Membahas Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan <i>Sustainability Report</i>	Penulis menggunakan Profitabilitas (ROA), Dewan Komisaris, dan Komite Audit	Berdasarkan hasil penelitian dan pembasasan sebelumnya, selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut :
						a. Kepemilikan saham institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas pengungkapan

						<p><i>sustainability report.</i> Perusahaan dengan kepemilikan saham institusi yang lebih besar memiliki probabilitas yang lebih besar untuk mengungkapkan <i>sustainability report.</i></p>
			<p>Dependen : <i>Sustainability Report</i></p>			<p>b. Kepemilikan saham manajerial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas pengungkapan <i>sustainability report.</i> Perusahaan dengan kepemilikan saham manajerial yang lebih besar memiliki probabilitas yang lebih kecil untuk mengungkapkan <i>sustainability report.</i></p>

						<p>c. Kepemilikan saham asing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas pengungkapan <i>sustainability report</i>. Perusahaan dengan kepemilikan saham asing yang lebih besar memiliki probabilitas yang lebih besar untuk mengungkapkan <i>sustainability report</i>.</p>
20	<p>Samiadji Huda Setyawan, Willi Sri Yulianddari, Wiwin Aminah (2018)</p>	<p>Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Sustainability Report (Studi Perusahaan Non Perbankan dan Non Keuangan yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada</p>	<p>Independen: Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Dewan Komisaris Independen</p>	<p>Membahas Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan <i>Sustainability Report</i></p>	<p>Penulis menggunakan Profitabilitas (ROA), Dewan Komisaris, dan Komite Audit</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa :</p>

		Tahun 2014-2016)				
			Dependen: Pengungkapan n <i>Sustainability Report</i>			a. Kepemilikan Manajerial pada perusahaan non perbankan dan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2016 berpengaruh secara negatif terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> .
						b. Kepemilikan Institusional pada perusahaan non perbankan dan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2016 tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>

						c. Dewan Komisaris Independen pada perusahaan non perbankan dan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2016 berpengaruh secara negatif terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> .
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Jurnal Terbitan yang Telah Diolah

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam menjalankan fungsionalnya, perusahaan melibatkan dua pihak yaitu *shareholders* dan *stakeholders*. Kedua belah pihak sama-sama membutuhkan suatu laporan yang mencakup kepentingan kedua belah pihak karena keduanya berpengaruh atau dipengaruhi. Maka dibuatlah suatu laporan yang disebut *sustainability report* yang mencakup tiga aspek, yaitu aspek ekonomi sebagai kepentingan dari *shareholders*, aspek sosial dan lingkungan sebagai kepentingan dari *stakeholders*. Melihat pada faktanya, masih banyak perusahaan yang belum mempublikasikan *sustainability report* karena masih menganggap *sustainability report* hanyalah laporan yang bersifat *voluntary disclosure* atau publikasi laporan yang bersifat sukarela. Namun disamping itu, sudah banyak perusahaan yang sudah mempublikasikan *sustainability report*. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor

yang mendorong perusahaan untuk mempublikasikan *sustainability report*. Sari dan Marsono (2013) mengatakan jika dilihat dari perspektif teori *stakeholder* dan teori legitimasi dapat dinyatakan bahwa demi mendapatkan kepercayaan dan pengesahan dari *stakeholders*, maka perusahaan akan mempublikasikan laporan yang bersifat wajib (*mandatory*) maupun yang bersifat sukarela (*voluntary*).

2.2.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Sustainability Report Disclosure*

Menurut Sartono (2012) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas yang tinggi akan memotivasi para manajer untuk mengungkapkan informasi yang lebih rinci agar manajer dapat memberikan keyakinan pada investor mengenai profitabilitas perusahaan (Singhvi dan Desai, 1971). Hal ini dikarenakan profit merupakan perwujudan dari hasil usaha atau kinerja dari manajer (Wardani, 2012). Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin rendah profitabilitas suatu perusahaan, kemungkinan perusahaan akan melakukan pengungkapan yang lebih kecil begitupula sebaliknya (Wardani, 2012). Pengungkapan *sustainability report* mampu meningkatkan nilai perusahaan (Saputro dkk, 2013) serta menggambarkan kinerja perusahaan yang baik sehingga dapat diterima oleh masyarakat (Lucia dan Panggabean, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Rosyid et al. (2017), Anindita (2014), Nasir et al. (2014) serta Kelvin Setiawan,dkk (2019) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

2.2.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Publikasi *Sustainability*

Menurut Brigham dan Houston (2014) ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan.

Perusahaan besar akan berada dibawah tekanan publik untuk melakukan lebih banyak tanggung jawab sosialnya karena mendapat lebih banyak perhatian dari masyarakat (Patten, 1991; Cowen et al, 1987; Mapparessa et al, 2017). Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki dampak kepada masyarakat yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kecil. Besar kecilnya perusahaan, akan mempengaruhi informasi yang diungkapkan untuk keberlangsungan kegiatan perusahaan. Ukuran perusahaan turut menentukan tingkat kepercayaan bagi para investor. Semakin besar perusahaan, maka semakin dikenal oleh masyarakat yang artinya semakin mudah untuk mendapatkan informasi yang akan meningkatkan nilai perusahaan. Bahkan, perusahaan besar yang memiliki total aktiva dengan nilai aktiva yang cukup besar dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut (Prasetyorini, 2013:186).

Penelitian yang dilakukan oleh Rotua Aprilya Tobing, Zuhrotun, dan Rusherlistyani (2019) dan Kelvin Setiawan,dkk (2019) tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan *sustainability report*.

2.2.3 Pengaruh *Good Corporate Governance Disclosure* Terhadap *Sustainability Report Disclosure*

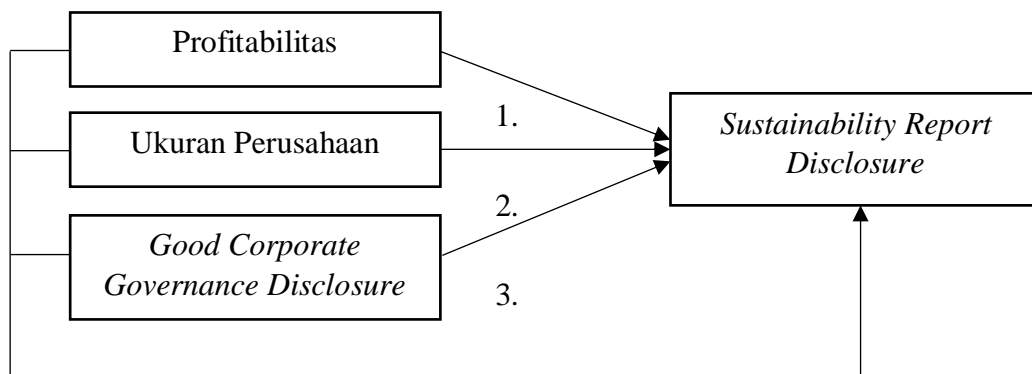
Perspektif teori *stakeholders* menjelaskan peran suatu perusahaan dalam hubungannya untuk memenuhi kepentingan-kepentingan yang berbeda antar *stakeholders*. *Corporate governance* sebagai pengatur kesetaraan hubungan diantara *stakeholders* sehingga tidak hanya mengutamakan beberapa *stakeholders* saja tetapi dapat menyetarakan berbagai macam kepentingan *stakeholders* demi menjaga keberlangsungan perusahaan (Aziz, 2014). Selain itu, tujuan dari diterapkannya *good corporate governance* adalah untuk menegakkan transparansi, akuntabilitas serta *check and balance* sehingga dapat memastikan kelangsungan perusahaan dimasa mendatang (KNKG, 2006). Kemudian *good corporate governance disclosure* digunakan sebagai instrumen untuk mengungkapkan informasi-informasi mengenai tata kelola perusahaan yang mana seluruh elemen dalam *good corporate governance* akan mendorong perusahaan untuk menyamaratakan seluruh pemangku kepentingan sehingga laporan mengenai sosial dan lingkungan akan diungkapkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rosyid et al. (2017), Sari dan Marsono (2013), serta Cep Dianul Adhan dan Sri Wahjuni Latifah (2018) tentang pengaruh *good corporate governance disclosure* terhadap *sustainability report disclosure*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara *good corporate governance disclosure* terhadap *sustainability report disclosure*.

Sesuai dengan judul penelitian “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan *Good Corporate Governance Disclosure* Terhadap *Sustainability Report Disclosure*” (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2018 – 2020) maka kerangka pemikiran yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut :

Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran



Keterangan :

1. – Irham Fahmi (2017:68)
 - Rahayu (2020)
 - Ria Aniktia dan Muhammad Khafid (2015)
 - Rotua Aprilya Tobing *et al* (2019)
 - Siska Liana (2019)
2. – Maya Sari (2021)
 - Ni'matul Hasanah *et al* (2015)
 - Rini Suharyani *et al* (2019)

- Fadhila Adhipradana dan Daljono (2014)
- 3. – Hasnati (2014:165)
 - Devi Istiani Roviqoh, Muhammad Khafid (2021)
 - Dwita Aliniar dan Sri Wahyuni (2017)
 - Mariya Safitri dan Saifudin

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:99) menjelaskan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empirik yang terkumpul.

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka hipotesis yang sesuai dengan judul penelitian “Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, *Good Corporate Governance* Terhadap Publikasi *Sustainability Report*” yaitu :

- Hipotesis 1 Terdapat pengaruh profitabilitas terhadap *sustainability report disclosure*.
- Hipotesis 2 Terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap *sustainability report disclosure*.
- Hipotesis 3 Terdapat pengaruh *good corporate governance disclosure* terhadap *sustainability report disclosure*.

